

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) (Pernyataan Anggaran Gender)

KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM	5.00.01.5.00.01.11.56. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE KEGIATAN	5.00.01.5.00.01.11.56.21. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Dasar Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Yakni UU No 25 Tahun 2004 Dan Permendagri No 54 Tahun 2010, Mengamanatkan Bahwa Penyusunan Dokumen Perencanaan Menggunakan Pendekatan Top Down, Bottom Up, Teknokratik, Politis, Aspiratif. - Musrenbang Salah Satu Instrumen Untuk Menjawab Pendekatan Bottom Up Dan Aspiratif - Kondisi Saat Ini Pada RKPD Tahun 2019 Dan 2020 Porsi Terkait Dengan Isu-Isu Gender Antara Lain : Disabilitas, Lansia, Pemuda, Anak, Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan (Janda), Dll Masih Minim - Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Dan 2020 Peserta Yang Hadir ... Orang. - Komposisi Jenis Kelamin Laki-Laki Dan ... Perempuan. - Komposisi Elemen Yang Hadir Pemerintah..., Swasta..., Masyarakat... (Ormas..., LSM...) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses - Undangan Tidak Menjangkau Semua Komponen Masyarakat - Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Disesuaikan Dengan Jadwal Kepala Daerah - Informasi Pelaksanaan Musrenbang Minim - E Planning Kaku Dan Belum Mengakomodir Semua Komponen Masyarakat Partisipasi - Materi Yang Disajikan Dan Cara Penyampaian Materi Belum Komunikatif Untuk Seluruh Komponen Yang Di Undang. Kontrol - Musrenbang Hanya Sebatas Memenuhi Amanat Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Manfaat Porsi Pengalokasian Anggaran Lebih Banyak Ditentukan Oleh Pendekatan Top Down Dan Politik. b. Penyebab Internal - Pengelola Kegiatan Belum Responsif Gender - Minimnya Pelaksanaan Sosialisasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Komponen Masyarakat Terkait Penyusunan Perencanaan - Karena Keterbatasan Anggaran Mengakibatkan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sangat Terbatas Dan Tidak Sebanding Dengan Substansi Yang Dibahas - Mindset Perencana Di Bappeda Bahwa Mengusulkan Kegiatan Yang Baru Diluar Renstra Tidak Di Perbolehkan c. Penyebab Eksternal - Tidak Semua Kelompok Masyarakat Memiliki Alamat Yang Jelas Untuk Dihubungi - Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Lebih Mengutamakan Seremonial Daripada Substansi Pembahasan

	- Tingkat Kehadiran Pemangku Kebijakan/Kepala OPD/SKPD Minim - Makin Tingginya Tingkat Pengawasan Pada Penyusunan Perencanaan - Masih Minimnya Informasi Yang Dimiliki Masyarakat Terkait Dengan Prioritas Pembangunan Dan Kewenangan Masing-Masing Pemerintah Daerah - Musrenbang Belum Dianggap Sebagai Sesuatu Hal Yang Penting Untuk Didukung Oleh Penganggaran Yang Maksimal - Domain Politik Dalam Penyusunan Penganggaran Lebih Dominan		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur a. Terwujudnya musyawarah prencanaan pembangunan Kecamatan yang partisipatif b. Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan. 2. Indikator dan Target Kinerja a. Pelaksanaan Program Pembangunan Wilayah Kecamatan b. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan. c. Jumlah dana yang dibutuhkan.		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM			
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	1 tahun	
		Masukan	Rp. 16.000.000,-
		Keluaran	Tersedianya anggaran Makan Minum
		Hasil	Terpenuhinya makan minum rapat yang dibutuhkan
		Keluaran	Tertanpungnya usulan per Nagari
		Hasil	Terwujudnya usulan yang prioritas Nagari
		Keluaran	Terlaksananya musrenbang Kecamatan
		Hasil	Terwujudnya usulan yang prioritas
Tamuan, 19 Maret 2020 CAMAT AIRPURA,  MUKHTAR IS, SE NIP. 196806111993031006			